

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN *E-OFFICE*
TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA
ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Muhammad Rizky Kurnia

Nim : 31401506046

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN *E-OFFICE*
TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA
ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh :

Muhammad Rizky Kurnia

31401506046

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian untuk Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung



Semarang, 6 April 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dedi Rusdi', is placed below the title 'Pembimbing,'.

Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Ak., C.A

NIK. 211496006

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN *E-OFFICE*
TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA
ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh :

Muhammad Rizky Kurnia

31401506046

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 5 Februari 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Ak., C.A

NIK. 211496006

Penguji 1



Dr. Dista Amatia Arifah, SE., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211406020

2022.08.26

12:37:31 +07'00'

Penguji 2



Naila Najihah, SE., MSc

NIK. 211418029

Digitally signed by Naila Najihah DN: cn=Naila Najihah, o=Indonesia, ou=Universitas Islam Sultan Agung, ou=Accounting Dept. Economic Faculty, email=najihah@unissula.ac.id Reason: I have reviewed this document Location: Date: 2022-08-18 22:34:07:00

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 20 Juli 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si

NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Kurnia

Nim : 31401506046

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH IMPLEMENTASI E-BUDGETING DAN E-OFFICE TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH”** adalah benar-benar hasil dari karya saya sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain. Pendapat maupun temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dirujuk atau dikutip secara kode etik ilmiah yang sesuai dan benar. Apabila jika dikemudian hari nantinya terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil dari karya orang lain atau plagiasi dari karya tulis orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Rizky Kurnia

NIM. 31401506046

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Kurnia

Nim : 31401506046

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

No.HP/Email : 085643945804/ rizkykurnia75@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah saya yang berupa Skripsi dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI E-BUDGETING DAN E-OFFICE TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH”** dan menyetujuinya menjadi milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Jika dekemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiasi, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Rizky Kurnia

NIM. 31401506046

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(H.R. Tirmidzi)

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together”

(Vincent Van Gogh)

PERSEMBAHAN :

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Hasil karya skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta .
2. Kedua adik saya yang tersayang.
3. Sahabat serta teman-teman yang saya cintai.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penulisan usulan penelitian skripsi ini dengan judul “PENGARUH IMPLEMENTASI E-BUDGETING DAN E-OFFICE TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH” dengan lancar dan tepat waktu, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.

Selama proses penyusunan usulan penelitian skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Olivia Khairunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku Dosen Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta waktu selama menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini. Terimakasih untuk waktu dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Segenap karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan tambahan ilmu bagi penulis.
5. Orang tua dan adik tercinta terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini. Sosok panutan dan penyemangat dalam proses penyusunan usulan penelitian skripsi ini.
6. Nivia Miranda Wandani, pasangan yang selalu menemani dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga selalu menjadi support system terbaik dalam keadaan apapun.

7. Sahabat serta teman-teman seperjuangan.

ABSTRAK

Sistem aplikasi *e-budgeting* dan *e-office* sangat diperlukan di era transformasi digital seperti sekarang untuk mewujudkan *good governance* dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia. Keduanya diperlukan dalam bidang pemerintahan dalam upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas terhadap keuangan daerah karena dinilai efektif dan dapat diakses oleh publik. Penelitian ini berjudul **PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN *E-OFFICE* TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**. Jenis penelitian yang digunakan yaitu data kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah ASN pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Penelitian ini untuk pengambilan sampel menggunakan metode non probabilitas (pemilihan non-random) dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini dianalisis menggunakan program IBM SPSS 18 dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis deskriptif, uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji parsial (t), uji simultan (f), koefisien determinasi (R^2), uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas, uji kolmogrov smirnov. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel adalah valid dan reliabel, hasil uji analisis deskriptif setiap variabel menunjukkan baik, hasil uji analisis regresi linier berganda setiap variabel bernilai positif, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai pengaruh positif, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa setiap variabel berpengaruh positif, hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa setiap variabel berpengaruh secara simultan, hasil uji normalitas memenuhi asumsi normalitas, hasil uji heterokedastisitas tidak terdapat problem heterokedastisitas, hasil uji multikolonieritas tidak terdapat problem multikolonieritas, hasil uji kolmogrov smirnov menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Kata Kunci : *E-Budgeting*, *E-Office*, Transparansi dan Akuntabilitas.

ABSTRACT

E-budgeting and e-office application systems are indispensable in this era of digital transformation to realize good governance with the principles of openness, justice and accountability to reduce corruption in Indonesia. Both are needed in the government sector in an effort to increase transparency and accountability for regional finances because they are considered effective and accessible to the public. This research is entitled THE EFFECT OF E-BUDGETING AND E-OFFICE IMPLEMENTATION ON THE LEVEL OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN CENTRAL JAVA PROVINCE GOVERNMENT ASN. The type of research used is quantitative data. The population in this study is the local government ASN of Central Java Province who has a minimum working period of 1 year. This study used a non-probability sampling method (non-random selection) using a purposive sampling method. This study was analyzed using the IBM SPSS 18 program using validity test, reliability test, descriptive analysis test, multiple linear regression analysis test, hypothesis test, partial test (t), simultaneous test (f), coefficient of determination (R²), normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, Kolmogorov Smirnov test. The results of the validity and reliability test showed that each variable was valid and reliable, the results of the descriptive analysis test of each variable showed good, the results of the multiple linear regression analysis of each variable were positive, the results of the hypothesis test showed that each variable had a positive effect, the results of the partial test (t) shows that each variable has a positive effect, the results of the simultaneous test (f) shows that each variable has a simultaneous effect, the results of the normality test meet the assumption of normality, the results of the heteroscedasticity test do not have heteroscedasticity problems, the results of the multicollinearity test do not have multicollinearity problems, the results of the Kolmogorov Smirnov test show that the data are normally distributed.

Keywords: *E-Budgeting, E-Office, Transparency and Accountability.*

INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu bagaimana pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mewajibkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabel. Hal tersebut membuat seluruh instansi pemerintah daerah hingga pusat wajib membuat pola kerja penganggaran ke era sistem informasi digital yang berbasis elektronik. *E-budgeting* dan *e-office* merupakan sistem aplikasi digital untuk mencapai *good governance*. *E-budgeting* memiliki manfaat untuk memudahkan dalam hal penganggaran dan *e-office* dapat digunakan dalam proses administrasi pemerintahan.

Populasi pada penelitian ini adalah ASN pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Penelitian ini dianalisis menggunakan program IBM SPSS 18. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel adalah valid dan reliabel, hasil uji analisis deskriptif setiap variabel menunjukkan baik, hasil uji analisis regresi linier berganda setiap variabel bernilai positif, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai pengaruh positif, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa setiap variabel berpengaruh positif, hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa setiap variabel berpengaruh secara simultan, hasil uji normalitas memenuhi asumsi normalitas, hasil uji heterokedastisitas tidak terdapat problem heteroskedastisitas, hasil uji multikolinieritas tidak terdapat problem multikolinieritas, hasil uji kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *E-Budgeting* dan *E-Office* mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan saling menguatkan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa *E-Budgeting* dan *E-Office* yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARTA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9

2.1	Landasan Teori	9
2.1.1	Teori <i>Stewardship</i>	9
2.1.2	Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10
2.2	<i>E-Budgeting</i>	11
2.3	<i>E-Office</i>	13
2.4	Transparansi	14
2.5	Indikator Transparansi	16
2.6	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	16
2.7	Akuntabilitas	17
2.8	Indikator Akuntabilitas	19
2.9	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	20
2.10	Penelitian Terdahulu	20
2.11	Kerangka Berpikir	24
2.12	Hipotesis Penelitian dan Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Populasi dan Sampel	28
3.3	Sumber dan Jenis Data	30
3.4	Metode Pengumpulan Data	31
3.5	Definisi Operasional, Variabel Penelitian dan Indikator.....	31
3.6	Teknik Analisa Data	34
3.6.1	Uji Validitas	34
3.6.2	Uji Reliabilitas	35

3.6.3	Analisis Deskriptif	35
3.7	Uji Asumsi Klasik	36
3.7.1	Uji Normalitas	37
3.7.2	Uji Heterokedastisitas	37
3.7.3	Uji Multikolonieritas	38
3.7.4	Regresi Linier Berganda	38
3.7.5	Uji Simultan (Uji f)	39
3.7.6	Koefisien Determinasi (R^2)	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Hasil Penelitian	41
4.2	Karakteristik Responden	41
4.2.1	Jenis Kelamin	41
4.2.2	Masa Kerja	42
4.2.3	Posisi Jabatan	43
4.3	Analisis Kualitatif	44
4.4	Teknik Analisis Data	45
4.4.1	Uji Validitas	45
4.4.2	Uji Reliabilitas	46
4.4.3	Analisis Deskriptif	47
4.5	Uji Asumsi Klasik	53
4.5.1	Uji Normalitas	53
4.5.2	Uji Heteroskedastisitas	54
4.5.3	Uji Multikolonieritas	55

4.5.4	Regresi Linier Berganda	56
4.5.5	Uji Simultan (Uji f)	57
4.5.6	Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.6	Pembahasan	59
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran	67
5.3	Keterbatasan Penelitian	68
5.4	Agenda Peneliti Mendatang	67
DAFTAR PUSTAKA		68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Definisi Operasional , Variabel Penelitian dan Indikator Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia.....	32
Tabel 3.2 Tafsiran Nilai Rata-rata.....	36
Tabel 4.1 Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.2 Masa Kerja Karyawan.....	42
Tabel 4.3 Posisi Jabatan.....	43
Tabel 4.4 Tafsiran Nilai Rata-rata.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	46
Tabel 4.7 Deskriptif <i>E-Budgeting</i>	47
Tabel 4.8 Deskriptif <i>E-Office</i>	49
Tabel 4.9 Deskriptif Transparansi dan Akuntabilitas	51
Tabel 4.10 Uji Kolmogrov Smirnov	57
Tabel 4.11 Uji Heterokedastisitas	55
Tabel 4.12 Uji Multikoloneritas	56
Tabel 4.13 Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4.14 Uji Simultan (Uji f).....	54
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi (R ²)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	24
Gambar 4.1 Pengujian Normalitas dengan Geafik Scatterplot	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	75
Lampiran 2 Data Responden.....	780
Lampiran 3 Jawaban Responden.....	83
Lampiran 4 Hasil Data Output SPSS	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditandatangani oleh Presiden mewajibkan mulai dari 1 Januari 2015 semua instansi pemerintah daerah hingga pusat menerapkan SAP akrual. Dalam penerapan SAP berbasis akrual mewajibkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabel. Hal tersebut membuat seluruh instansi pemerintah daerah hingga pusat wajib membuat pola kerja penganggaran ke era sistem informasi digital yang berbasis elektronik (Adwirya, 2015).

Era penganggaran berbasis digital acapkali disebut *e-budgeting*. *E-budgeting* ialah suatu sistem digital penganggaran yang berbasis software atau program untuk memfasilitasi proses penganggaran dengan tujuan mempermudah pelaksanaan dari kegiatan penganggaran dan perencanaan (Andriyanto, 2014). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah merancang program *e-budgeting* untuk digunakan pemda di Indonesia, sehingga bisa mewujudkan peningkatan kinerja keuangan pemda di Indonesia serta membantu penerapan prinsip *good governance* (Asis, 2015).

Seiring keberjalanannya *e-budgeting* diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat seperti proses transaksi serta penyiapan laporan yang lebih cepat, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, akurat dalam perhitungan, biaya pemrosesan lebih murah, isu keuangan yang lebih relevan, cepat, mudah,

lengkap dan dapat diuji kebenarannya (Asrida, 2015). Selain *e-budgeting* terdapat juga suatu sistem aplikasi yang berhubungan dengan administrasi yang dikenal dengan kata *e-office*.

E-office ialah salah aplikasi yang saat ini mulai banyak digunakan dalam sistem administrasi modern. Di Indonesia sendiri penggunaan *e-office* sendiri telah banyak digunakan pada dunia industri, pemerintah dan tak terlepas yaitu lembaga Pendidikan (Endrayanti, 2014). Dengan adanya *e-office* diharapkan segala proses kegiatan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien dengan salah satu unsur-unsur peningkatan *good corporate governace* (GCG) yang diukur melalui transparansi dan akuntabilitas (Herman, 2018). Selanjutnya *e-office* dalam fungsi transparansi dan akuntabilitasnya akan dapat menciptakan kepercayaan publik. Aplikasi *e-office* adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi yang secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi di mana data informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikas dengan tujuan membangun suatu sistem yang mampu mengakomodasi setiap unsur *good corporate governace* (GCG) (Faridah, 2013).

Good Governance atau tata laksana pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem tata kelola yang memiliki prinsip keterbukaan, keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengungkapkan bahwa setiap badan publik, termasuk Pemerintah Daerah berkewajiban menerbitkan informasi publik atas setiap aktivitas yang dilaksanakan. Undang-undang tersebut mempertegas tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya instruksi Menteri Dalam Negeri

No. 188.52/1779/SJ/2012 mengenai peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) (Permendagri, 2008). Reformasi keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya paket undang-undang (UU) Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan UU tentang Otonomi Daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004), serta Peraturan Pemerintah (PP) (PP No. 58 Tahun 2005) dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Salah satu sorotan utama reformasi keuangan daerah adalah terwujudnya pengelolaan keuangan publik yang transparan dengan berlandaskan pada konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi publik.

Cui mengungkapkan bahwa peraturan-peraturan yang telah diterbitkan ternyata tidak diiringi dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Sekretariat Nasional Forum Indonesia menyatakan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah. Rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat di daerah. Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah selama periode tahun 2010 hingga Mei 2019 sebanyak 483 kasus. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan selama periode tahun 2015 hingga 2019 sebanyak 203 kasus korupsi terjadi dengan tersangka kepala daerah (Fajri, 2019).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Ramadhan pada 32 pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah (Nasution&Ramadhan,

2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Vanda yang menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya (Vanda, 2020). Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Atika bahwa tidak ada pengaruh Implementasi *e-budgeting* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, hal tersebut disebabkan karena penerapan *e-budgeting* pada Pemerintah Kota Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun sehingga ukuran pengaruhnya belum dapat dinilai secara maksimal dan hal tersebut diperjelas dengan hasil hubungan antara *e-budgeting* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi juga bernilai rendah (Nasution&Atika, 2019).

Selain sistem penganggaran digital, aplikasi yang berhubungan dengan administrasi yaitu *e-office*. Sistem aplikasi yang berhubungan dengan administrasi atau dikenal dengan *e-office* yang menunjukkan bahwa ketercapaian atau implementasi *e-office* dalam meningkatkan fungsi transparansi dan akuntabilitas sudah tercapai bahkan ada sangat tercapai namun secara hubungan ternyata terdapat tidak pengaruh Implementasi *e-office* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Nasution&Malikhah, 2020). Nurshe dan Noviyanto dalam penelitiannya pada tahun 2016 menyatakan aplikasi berupa sistem *e-office* dapat memberikan kemudahan dalam mengelola administrasi perkantoran seperti proses surat menyurat. Sistem aplikasi *e-budgeting* dan *e-office* sangat diperlukan di era transformasi digital seperti sekarang untuk mewujudkan *good governance* dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia.

Tingginya kasus korupsi di Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tiap daerah. Kebijakan transparansi dipengaruhi oleh kualitas implementasi *e-budgeting* (Nasution&Atika, 2019). Penelitian Nasution dan Ramadhan pada tahun 2020 mengenai pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia mengemukakan hasil regresi implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Atika yang menemukan bahwa implementasi *e-budgeting* menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai lebih informatif (lebih transparan). Dalam memperluas area penelitian di Indonesia dan sebagai *novelty* riset, maka peneliti melakukan replikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Ramadhan, namun penelitiannya hanya membahas pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia saja.

Peneliti ingin mengembangkan penelitian kedalam lingkup yang lebih luas dengan meneliti pengaruh implementasi *e-budgeting* dalam segi keuangan dan *e-office* dalam segi administrasi terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada keuangan daerah di Indonesia. *E-budgeting* dan *e-office* pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan karena dapat memberikan informasi yang efektif dan bermanfaat bagi para pejabat pemerintah didalam mengambil keputusan mengenai upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Kemajuan teknologi mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan tatanan dalam berbagai sektor pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan publik dapat dilakukan dengan *electronic system*. *E-budgeting* dan *e-office* merupakan sistem aplikasi digital untuk mencapai *good governance*. *E-budgeting* memiliki manfaat untuk memudahkan dalam hal penganggaran dan *e-office* dapat digunakan dalam proses administrasi pemerintahan.

Keduanya diperlukan dalam bidang pemerintahan dalam upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas terhadap keuangan daerah karena dinilai efektif dan dapat diakses oleh publik. Namun pada kenyataannya penerapan atau implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada keuangan daerah masih terbatas pada beberapa daerah di Indonesia saja. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh implementasi *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menjelaskan pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menjelaskan pengaruh implementasi *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk berbagai kalangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis mengenai pandangan penulis, serta menambah kajian dan pemikiran tentang pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada keuangan daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya membuat kebijakan terkait undang-undang dalam mengatur transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui informasi secara mudah, jelas dan transparan mengenai pengelolaan anggaran keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga masyarakat mampu berperan dalam memberantas korupsi di Jawa Tengah.

- Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya yang dapat dihubungkan dengan variabel lain seperti *e-planning* dan lain sebagainya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan teori sebagai berikut:

2.1.1 Teori *Stewardship*

Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. merupakan teori mengenai paradigma untuk memahami hubungan antara pemilik dan manajemen dari suatu organisasi. Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik atau *stakeholders* (Anwar, 2013).

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Donald&David, 1991).

Sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (*driver*)

berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dnegan tumbuhnya spesialisasi dalam akutansi dan perkembangan sektor publik.

Konsep inti dari teori *stewardship* adalah kepercayaan. Menurut Huse dalam teori *stewardship*, para manager digambarkan sebagai “*good steward*”, dimana mereka setia menjalani tugas dan tanggungjawab yang diberikan, tidak hanya termotivasi pada materi dan uang, akan tetapi pada keinginan untuk mengaktualisasi diri dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan serta menghindari konflik kepentingan dengan *stakeholdernya*.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada keuangan daerah di Indonesia. Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim&Abdullah, 2012). Menurut Lane, teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara dmeokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal-agen. *Principal* bisa mengurangi *asymmetric information* dengan menempatkan pengawas, diantaranya adalah biaya yang mahal. Selain itu, beberapa jenis pekerjaan tidak memungkinkan dilaksanakan pengawasan terutama tugas-tugas yang melibatkan *street level*. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *cheks and balances* agar dapat mengurangi *asymmetry information* (Setiawan, 2012).

Berdasarkan *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin bertambahnya *informan asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

2.2 E-Budgeting

E-budgeting atau sering disebut dengan *elektronik budgeting* merupakan sistem anggaran elektronik atau digital yang dibuat melalui aplikasi atau web. *E-budgeting* adalah salah satu bagian dari *e-government* yang dibuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran atau *budgeting*. *E-budgeting* disusun berbasis web atau aplikasi sebagai suatu fasilitas dalam proses penyusunan anggaran belanja yang dapat diakses atau dibuka oleh semua orang dan semua kalangan (Klitgard, 2015). Terdapat tujuh fungsi anggaran atau *budgeting* dalam sektor publik diantaranya (Khairudin, 2016):

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*), anggaran sebagai alat perencanaan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, merencanakan apa yang dilakukan, jumlah biaya yang diperlukan, dan hasil yang akan diperoleh.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*), anggaran memuat rencana rinci berupa pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*), anggaran dipakai untuk menstabilkan ekonomi juga mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*), penyusunan anggaran dibutuhkan kemampuan manajemen keuangan publik serta kemampuan dalam bernegosiasi dari manager publik.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*), anggaran alat koorodinasi antara bagian di pemerintahan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja di lingkungan eksekutif yang kemudian dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaiann kinerja (*performance measurement tool*), alat untuk menilai kinerja efisiensi dan pelaksanaan anggaran organisasi.
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*), membuat target dan tujuan sesuai dengan kemampuan untuk memotivasi sehingga bekerja dengan ekonomis, efektif dan efisien.

Terdapat empat tahap siklus anggaran menurut (Kholmi, 2014) yang terdiri atas:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini dilakukan berupa perkiraan atau taksiran pengeluaran pendapatan yang tersedia.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ratifikasi pimpinan eksekutif harus memiliki kemampuan untuk menjawab dan memberikan pendapat atau argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Implementasi

Tahap pelaksanaan anggaran penting diperhatikan oleh manajer bagian keuangan publik. Manajer keuangan public memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi sistem akuntansi yang cukup memadai untuk perencanaan anggaran yang telah disepakati saat ini atau perencanaan anggaran dalam periode selanjutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Tahap pelaporan dan evaluasi dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang terdapat pada hasil kerja sebelumnya dengan tujuan menghasilkan suatu pencapaian yang lebih baik kedepannya.

2.3 E-Office

E-office atau *electronic office* sering disebut dengan otomatisasi perkantoran.

Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya computer (Lulaj, 2019). Otomatisasi perkantoran merupakan proses pengalihan metode pencatatan, penghimpunan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan bahan-bahan keterangan dari metode manual yang banyak melibatkan tenaga manusia kepada metode

otomatis yang banyak melibatkan operasi mesin otomatis bahkan komputer. Era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Otomatisasi perkantoran tidak bisa dipisahkan dari teknologi perkantoran, sebab otomatisasi merupakan bentuk pengembangan teknologi, dalam hal ini pergeseran dari teknologi manual kepada teknologi otomatis (Sa'adah, 2015).

Dalam *e-office*, pegawai mempunyai akses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di dalam file komputer miliknya atau milik orang lain, karena dalam *e-office*, antar komputer dalam suatu perkantoran saling terkoneksi. *E-office* merupakan *software* dan digunakan untuk mengatur pola pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan oleh pegawai, menyimpan dan mengontrol konten-konten yang ada di dalam suatu organisasi secara elektronik (Puron, 2018).

2.4 Transparansi

Transparansi atau *transparency* yang secara harfiah dapat juga disebut jelas (*obvious*), artinya dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan atau *openness* (Rahman, 2018). Bila dikaitkan dengan aktivitas maka transparansi dapat diartikan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (Shopia, 2013).

Dalam konteks *Good Governance*, transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan (Susanto, 2015). Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti masyarakat. Terdapat delapan aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans menurut Sriwijayanti yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat publik
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik
7. Keamanan dan ketertiban

Adapun indikator transparansi menurut *Institute for Democracy in South Africa* (IDASA) yaitu :

1. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi anggaran.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
3. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang independen dan efektif serta didukung oleh lembaga statistik yang memiliki data akurat dan berkualitas.

4. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
5. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran yaitu adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

2.5 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003) dalam Rahmanurrajid (2008:87-88) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

2.6 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2004:30) mengatakan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya

publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.7 Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Woro, 2016). Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Permendagri, 2010).

Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara

periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela (Zucolotto, 2015). Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk membuat perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadilan organisasi, lalu menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan. Indikator akuntabilitas pemerintah daerah meliputi aspek politis, aspek finansial, kepuasan masyarakat, konsistensi kantor dalam menjalankan kegiatan dan tugasnya berpedoman pada rencana strategik dan rencana operasionalnya, kepuasan para aparatur dan pelayanan umum yang diberikan berpedoman pada peraturan terkait pelayanan public (Mardiasmo, 2009).

2.8 Indikator Akuntabilitas

Menurut (Sophia, 2013) beberapa indikator akuntabilitas yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi:
 - Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
 - Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.
 - Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi:
 - Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.9 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis (Akbar, 2012). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Shopia, 2013).

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada keuangan daerah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut mempunyai variabel yang berbeda, dengan hasil berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

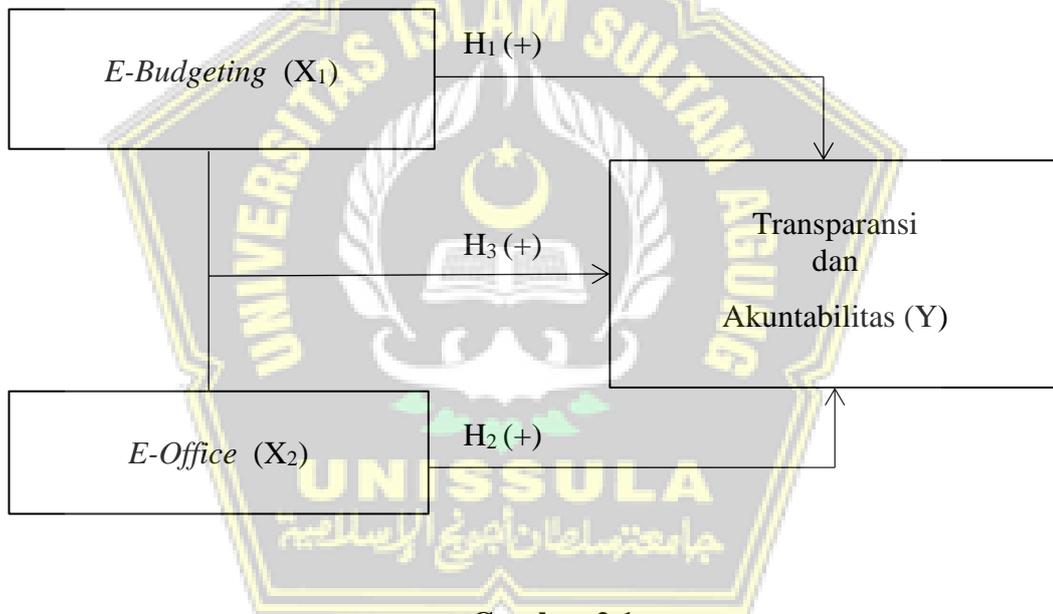
No	Judul & Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Implementasi <i>E-Budgeting</i> Terhadap Transparansi Keuangan Daerah di Indonesia (Dito Aditia Darma Nasution & Puja Rizqy Ramadhan, 2019).	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi <i>e-budgeting</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia.
2.	Implementasi <i>E-Budgeting</i> Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai (Anggi Pratama Nasution & Atika, 2019).	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran sistem <i>e-budgeting</i> dalam meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah kota Binjai telah tercapai.
3.	Implementasi <i>E – Office</i> Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Universitas Pembangunan Panca Budi (Anggi Pratama Nasution & Ikhah Malikah, 2020)	Variabel Independen: <i>E-Office</i> Variabel Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran sistem <i>e-office</i> dalam meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas pada Universitas Pembangunan Panca Budi telah tercapai
4.	Penerapan Sistem <i>E-Budgeting</i> Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya) (Dimas Rizky Gunawan, 2016)	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi <i>e-budgeting</i> berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur operasional standar.
5.	Pengaruh Implementasi <i>E-Budgeting</i> Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya (Vanda Indhiaura P, 2020)	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi <i>e-budgeting</i> mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya.

6.	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: <i>E-Budgeting</i> untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Atik Andhayani, 2020)	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>E-Budgeting</i> telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan.
7.	The Implementation of <i>E-Budgeting</i> Policy in <i>Regional Government</i> (A Case Study in Jakarta Province Province) (ondy <i>et al</i> , 2019)	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: Regional government in Jakarta Province	Efektivitas dari implementasi <i>e-budgeting</i> kebijakan implementasi mempengaruhi oleh sumber daya manusia dalam penguasaan informasi dan teknologi komunikasi, anggaran politik dan kepentingan berlawanan dari eksekutif dan legislatures.
8.	<i>Determinants of the Effectiveness of Implementation Performance Based-Budgeting and Budget Absorption in Local Governments</i> (Friyani&Hernando, 2019)	Variabel Independen: <i>E-Budgeting</i> Variabel Dependen: <i>Absorption in local governments</i>	Hasil pemrosesan data menemukan bahwa pelatihan, pemahaman, pendidikan dan tekanan eksternal memiliki efek positif pada efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja dan penyerapan anggaran
9.	Penerapan <i>E-Office</i> Dalam Administrasi Perkantoran (Studi Kasus: Balitbangda Prov. Sumsel) (Oktaf Juairiyah & Hendrixon, 2017)	Variabel Independen: <i>E-Office</i> Variabel Dependen: Administrasi Perkantoran	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aplikasi <i>e-office</i> pada Balitbangda Prov. Sumsel sebagai bagian dari <i>e-government</i> , sangat membantu terutama proses pengambilan keputusan kebijakan.

10.	Penerapan <i>E-Office</i> Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Bisnis Perusahaan (Nada Nur Izzati & Marsofiyati, 2018)	Variabel Independen: <i>E-Office</i> Variabel Dependen: Peningkatan Kinerja Bisnis Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi <i>e-office</i> terbukti sangat membantu dalam mempercepat proses bisnis perkantoran.
11.	Penyuluhan Pengimplementasian Aplikasi <i>E-Office</i> Untuk Mendukung Penerapan <i>E-Government</i> Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Fristi R, Penda Sudarto H, Agustina S, & R. Mahdalena S, 2018)	Variabel Independen: <i>E-Office</i> Variabel Dependen: Penerapan <i>E-Government</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-office</i> terbukti dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan perkantoran.
12.	Penerapan <i>E-Office</i> Dalam Rangka Mewujudkan <i>E-Government</i> (Studi Kasus: Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali) (Ni Made Indra R, Ni Nyoman Dewi P & Ni Wayan Supriyanti, 2015)	Variabel Independen: <i>E-Office</i> Variabel Dependen: Penerapan <i>E-Government</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-office</i> pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali belum optimal dalam mendukung terwujudnya <i>e-government</i> dikarenakan tingkat kemampuan SDM yang masih rendah dibidang teknologi.

2.11 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan *intervening*, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan kerangka berpikir (Sugiyono, 2010).



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Keterangan :

H₁ : Implementasi *e-budgeting* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpengaruh secara Parsial (X₁ terhadap Y)

H₂ : Implementasi *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpengaruh secara Parsial (X_2 terhadap Y)

H₃ : Implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpengaruh secara Simultan (X_1 dan X_2 terhadap Y)

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar *variable independen* dan *dependen*. Bila dalam penelitian ada *variable moderator* dan *intervening*, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian.

Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigam penelitian harus didasarkan kerangka berpikir (Sugiyono, 2010).

2.12 Hipotesis Penelitian dan Kerangka Konseptual

Hipotesis merupakan penjelasan semenstara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan

(Nasution, 2019). Implementasi *e-budgeting* yang efektif pada tiap daerah di Indonesia diharapkan akan memperoleh manfaat dalam kemudahan dalam pengelolaan keuangan daerah, proses transaksi akan lebih cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat model kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengaruh implementasi *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E-office atau sistem aplikasi dalam administrasi yang digunakan pemerintah dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau *good governance*. *E-office* diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam proses administrasi atau pendokumenan yang meminimalisir resiko kehilangan, kemudahan dalam pengelolaan dokumen, kemudahan dalam pencarian dokumen atau arsip dokumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

H₂ : Implementasi *e-office* berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E-budgeting merupakan sistem aplikasi berbasis digital yang digunakan untuk mengelola anggaran keuangan. *E-budgeting* memiliki banyak manfaat seperti kemudahan dalam proses pengelolaan, cepat aman

dan tepat. Selain itu, *E-office* juga merupakan sistem aplikasi dalam hal administrasi. Aplikasi ini dibutuhkan pemerintah dalam hal administrasi karena dinilai aman dan lebih efektif. *E-budgeting* dan *e-office* diperlukan pemerintah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan daerah di Indonesia yang dapat diakses publik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif (Sugiyono, 2015). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih berfokus pada pengolahan data secara statistik menggunakan angka-angka dimana variabelnya dapat diukur validitas dan reliabilitasnya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi secara sistematis dan akurat yang berfokus pada data faktual serta tidak memerlukan suatu hipotesis.

Data dalam penelitian ini berupa nilai kinerja *e-budgeting* serta data pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari *Indonesia Governance Index* 2018. Data pengelolaan keuangan daerah tersebut diolah dari website resmi pemerintah daerah (Yidliz, 2017).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh unsur yang akan diteliti. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau benda yang diasikan suatu objek dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Populasi dibedakan menjadi dua yaitu populasi target dan populasi survei. Populasi target merupakan populasi yang sudah ditentukan mengenai masalah penelitian. Populasi survei merupakan populasi yang terlibat didalam populasi target. Populasi target dalam penelitian ini adalah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah subjek dari penelitian. Besar sampel dipengaruhi oleh teknik pengambilan sampel (*sampling*). *Sampling* merupakan proses menyeleksi jumlah populasi supaya dapat mewakili populasi. Teknik *sampling* yaitu cara untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang digunakan untuk mewakili populasi (Ghozali, 2014). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu non probabilitas (pemilihan *non-random*) dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengambilan sampel tersebut didasarkan pada jumlah data yang tersedia. Kriteria sampel yang akan menjadi subjek penelitian ini yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara yang berdinasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Aparatur Sipil Negara yang berdinasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masa kerja minimal 1 Tahun.

Karena jumlah populasi masih dalam ukuran perkiraan dengan jumlah yang tak pasti, maka peneliti menggunakan penentuan sample dengan rumus (Wibisono, 2003), jika digunakan untuk mengestimasi μ , kita dapat $(1-\alpha)\%$ yakin bahwa error tidak melebihi nilai e tertentu apabila ukuran sampelnya sebesar n , dimana apabila nilai σ tidak diketahui, kita dapat menggunakan s dari sampel sebelumnya (untuk $n \geq 30$) yang memberikan estimasi terhadap σ , maka standar deviasi populasinya adalah 0,25. Apabila peneliti ingin menggunakan tingkat presisi 5%, dan tingkat kepercayaannya 95%, dan error estimasi μ kurang dari 0,05. karena $\alpha = 0,05$ maka $Z_{0,05} = 1,96$. Dalam pengambilan sampel, rumus sebagai berikut :

$$n = \left[\frac{Z_{0,05/2} \cdot \sigma}{e} \right]^2 \qquad n = \left[\frac{(1,96) \cdot (0,25)}{0,05} \right]^2$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

Z = Nilai table Z = 0.05 /1,96

σ = Standar deviasi populasi

e = Tingkat kesalahan

Dengan demikian peneliti yakin dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari jumlah sampel yang telah dihitung menggunakan rumus tersebut, yaitu ditentukan 97 sampel nasabah dari semua populasi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Untuk memperlengkap pembulatan sampel maka penulis membulatkan menjadi **100** Sampel ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bagian Keuangan dan Akutansi.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi atau data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian yang terdiri atas struktur data kearsipan, data yang bersifat publik, laporan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian (Ghozali, 2014).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2010). Penyebaran kuesioner terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dimana jawaban-jawabannya telah dibatasi oleh peneliti. Sedangkan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan jalan pikirannya (Kuncoro, 2003).

3.5 Definisi Operasional, Variabel Penelitian dan Indikator

Definisi operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan (Sugiyono, 2016). Definisi operasional adalah istilah yang digunakan untuk memonitor atau mengukur setiap variabel yang harus diidentifikasi secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran secara cermat dan jelas.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Berikut penjelasan kedua variabel tersebut:

1. Variabel bebas (*Independent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent*). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independennya adalah *e-budgeting* (X_1) dan *e-office* (X_2).
2. Variabel terikat (*Dependent Variable*) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah transparansi dan akuntabilitas (Y).

Indikator penelitian adalah variabel-variabel yang menunjukkan kepada peneliti mengenai suatu keadaan tertentu, sehingga dapat dijadikan untuk mengukur perubahan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan menggunakan indikator aksesibilitas, ketetapan waktu publikasi, perubahan tanggal dan tahun pengamatan keuangan daerah yang telah dimodifikasi oleh Nasution. Terdapat 10 penilaian dalam tahap perencanaan APBD terdiri dari 10 indikator, 9 indikator tahap pelaksanaan APBD dan 10 indikator tahap pelaporan serta pertanggungjawaban.

Tabel 3.1

Definisi Operasional , Variabel Penelitian dan Indikator

Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Tahapan	Rincian Indikator
Variabel independent: <i>e-budgeting</i> (X_1) dan <i>e-office</i> (X_2)	<i>E-budgeting</i> adalah salah satu bagian dari <i>e-government</i> yang dibuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran atau <i>e-budgeting</i> dan <i>e-</i>	Perencanaan	Ringkasan Dokumen RKPД
			Kebijakan Umum Anggaran
			Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
			Ringkasan Dokumen RKA-SKPD
			Ringkasan Dokumen RKA-PPKD

	<i>office</i> merupakan software dan digunakan untuk mengatur pola pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan oleh pegawai, menyimpan dan mengontrol konten-konten yang ada di dalam suatu organisasi secara elektronik (Puron, 2018).		Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
			Peraturan Daerah tentang APBD
			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			Ringkasan DPA SKPD
			DPA PPKD
			Realisasi Pendapatan Daerah
			Realisasi Belanja Daerah
			Realisasi Pembiayaan Daerah
			Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
		Pelaksanaan	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Variabel terikat: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Indonesia (Y)	Transparansi atau <i>transparency</i> yang secara harfiah dapat juga disebut jelas (<i>obvious</i>), artinya dapat dilihat secara menyeluruh (<i>able to be seen through</i>). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan atau <i>openes</i> (Rahman, 2018). Dan Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic (Woro, 2016).		Ringkasan RKA Perubahan APBD
			Rencana Umum Pengadaan
			SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
			Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
			Laporan Arus Kas
			Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
		Pelaporan dan Pertanggung jawaban	Laporan Realisasi Anggaran PPKD
			Neraca
			CaLK Pemerintah Daerah
			Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
			Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
			Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Opini BPK RI

3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Uji Validitas

Validitas berkaitan dengan persoalan untuk membatasi atau menekan kesalahan-kesalahan dalam penelitian sehingga hasil yang diperoleh akurat dan berguna untuk dilaksanakan. Uji validitas (validity) dimaksudkan untuk menguji kualitas kuesioner. Kuesioner yang baik adalah kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritis tabel korelasi nilai r . Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson Product Moment, dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\}\{n \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Setelah angka korelasi diketahui, kemudian dihitung nilai t :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Setelah itu, dibandingkan dengan nilai kritisnya. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak akan diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pernyataan-pernyataan yang valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel dengan judul Item – Total Statistik. Menilai valid

tidaknya masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai *Corrected item-Total Correlation* masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected item-Total Correlation* $> 0,30$.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk uji reliabilitas digunakan metode *split half*, hasilnya bisa dilihat dari nilai *Correlation Between Forms*. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel atau membandingkannya dengan nilai *cut off point* 0,3 maka reliabel jika $r > 0,3$. Sebaliknya, apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. Pengujian reliabilitas dengan *Alpha Cronbach* bisa dilihat dari nilai Alpha, jika nilai Alpha $>$ dari nilai r_{tabel} yaitu 0,6 maka dapat dikatakan reliabel.

3.6.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar berlaku. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Hasil penyebaran kuesioner tersebut selanjutnya dicari rata-ratanya dengan menggunakan rumus dari Husein Umar (2011:130) :

$$\text{Nilai rata - rata} = \frac{\sum(\text{frekuensi} \times \text{bobot})}{\sum \text{sampel} (n)}$$

Setelah rata-rata skor dihitung, maka untuk mengkategorikan

mengklasifikasikan kecendrungan jawaban responden kedalam skala dengan formulasi sebagai berikut :

Skor minimum = 1

Skor maksimum = 5

Lebar Skala = $\frac{5-1}{5} = 0,8$

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tafsiran Nilai Rata-rata

No	Interval	Kategori
1	Interval 1 – 1,80	Sangat Rendah
2	Interval 1,81 – 2,60	Rendah
3	Interval 2,61 – 3,40	Sedang
4	Interval 3,41 – 4,20	Tinggi
5	Interval 4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

3.7 Uji Asumsi Klasik

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan apakah model regresi dalam penelitian ini dengan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) atau tidak. Rinaldi menyatakan secara umum uji asumsi klasik pada model regresi meliputi :

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan *plotting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Rinaldi, 2016).

Selain itu untuk menentukan uji normalitas maka akan digunakan juga Uji kolmogorov smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji kolmogorov smirnov adalah distribusi Normal (apakah suatu berdistribusi normal). Dasar pengambilan keputusan Uji Kolmogorov Smirnov yaitu data yang normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05.

3.7.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Rinaldi, 2016). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, sumbu x adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (Rinaldi, 2016). Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel bebas = 0.

3.7.4 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-budgeting* dan *e-office* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia , dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel terikat (Transparansi dan Akuntabilitas)

a : Bilangan konstanta

b₁ : Koefisien regresi antara *e-budgeting* dengan transparansi dan akuntabilitas

b₂ : Koefisien regresi antara *e-office* dengan transparansi dan akuntabilitas

e : Variabel error (*error term*)

3.7.5 Uji Simultan (Uji f)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X_1 dan X_2 berpengaruh secara bersama terhadap variabel Y . Uji simultan dilakukan secara serentak untuk membuktikan hipotesis awal tentang pengaruh implementasi *e-budgeting* (X_1) dan *e-office* (X_2) secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia (Y) sebagai variabel terikat. Adapun hipotesis yang didapat diajukan untuk uji F adalah sebagai berikut:

Hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima artinya ada pengaruh implementasi *e-budgeting* (X_1) dan *e-office* (X_2) secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia (Y).

Hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak artinya tidak ada pengaruh implementasi *e-budgeting* (X_1) dan *e-office* (X_2) secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia (Y).

Kriteria pengujian dengan SPSS:

Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.7.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi untuk mencari pengaruh *varians variabel* dapat digunakan teknik statistik dengan menghitung besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung dengan dikuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan dengan 100% (Sugiyono, 2016).

Rumus : $R^2 = r^2 \times 100\%$

Keterangan :

R^2 : Koefisien Determinasi

R : Koefisien Korelasi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian dan analisis study, akan diuraikan dengan analisis deskriptif dengan bantuan program SPSS 18. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan gambaran objek penelitian yang meliputi karakteristik responden. Analisis ini bertujuan untuk mendukung dan menjabarkan pembahasan secara rinci, sedangkan analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel – variabel yang telah diteliti dan untuk uji hipotesis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Dari jumlah sampel yang telah dihitung menggunakan rumus tersebut, yaitu ditentukan 100 sampel nasabah dari semua populasi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Untuk memperlengkap sampel **100** Sampel ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bagian Keuangan dan Akutansi.

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Jenis Kelamin

		Jenis_Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	35	35,0	35,0	35,0
	Perempuan	65	65,0	65,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dikemukakan bahwa jenis kelamin responden paling banyak adalah wanita yaitu dengan presentasi sebesar 65 %, kemudian jumlah responden paling sedikit yaitu ada pada kaum pria sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian banyak karyawan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara Pemprov Jawa Tengah di dominasi oleh kaum Wanita, dikarenakan pekerjaan dibidang kepegawaian memang lebih banyak menggunakan jasa – jasa pelayanan kaum wanita dalam bidang administrasi pegawai negeri sipil memang sangat dibutuhkan karena mereka cenderung untuk memiliki ketelitian dan kesabaran dalam pelayanannya. Kemudian presentase yang paling sedikit ada pada karyawan pria dengan jumlah 35% hal ini dikarenakan di ASN Pemprov Jawa Tengah membutuhkan tenaga pria untuk pekerjaan tanggap dan mampu bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Sehingga jumlah mereka dalam survei yang dilakukan oleh peneliti cenderung lebih sedikit.

4.2.2 Masa Kerja

Tabel 4.2
Masa Kerja Karyawan

Masa Kerja					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 – 5 Tahun	57	57,0	57,0	57,0
	Lebih dari 5 Tahun	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah responden lama bekerja sebagai ASN Pemprov Jawa Tengah yaitu satu sampai lima tahun dengan

presentase sebesar 57 %. Kemudian jumlah presentase yang paling sedikit yaitu ada pada responden dengan masa kerja sebagai ASN Pemprov Jawa Tengah dengan jangka waktu lebih dari lima tahun . Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden dalam gambaran penelitian terhitung tepat karena sebagian besar responden memiliki frekuensi lebih dari satu tahun yang cocok untuk menjadi objek penelitian pengaruhnya dengan transparansi dan pembentukan akuntabilitas pada keuangan ASN Pemprov Jawa Tengah.

4.2.3 Posisi Jabatan

Tabel 4.3
Posisi Jabatan

		Posisi_Jabatan			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Teknisi Sipil	40	40,0	40,0	40,0
	Peneliti	30	30,0	30,0	70,0
	Kepegawaian	15	15,0	15,0	85,0
	Fungsional_Kusus	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang paling banyak dijadikan penelitian adalah dalam posisi teknisi sipil yaitu sebesar 40 % dikarenakan jumlah teknisi sipil kepegawaian memang sangat banyak di ASN Pemprov Jawa Tengah sangat diperlukan pegawai teknisi sipil untuk membentuk kegiatan oprasional pada bidang kemasyarakatan. Kemudian jumlah presentase paling sedikit ada pada Kepegawaian dan Fungsional Kusus 15%. Karena pada responden ASN Pemprov Jawa Tengah pada saat penyebaran kuesioner kepada

Kepegawaian dan Fungsional Kusus sangat sulit dikarenakan pekerjaan mereka yang terlalu sibuk dan menuntut untuk tetap siap siaga. Sehingga peneliti mampu mengumpulkan responden sebanyak 15% untuk Kepegawaian dan Fungsional Kusus yang ada sebagai ASN pada Pemprov Jawa Tengah.

4.3 Analisis Kualitatif

Berdasarkan hasil tanggapan dari 100 orang responden tentang pengaruh implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah melalui *E-Budgeting* dan *E-Office*, maka peneliti akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dengan kategori rendah, sedang dan tinggi sebagai berikut, menurut (Umar, 2012) :

$$RS = \frac{TT-TR}{Kelas}$$

5 = skala likert tertinggi yang digunakan dalam penelitian

1 = skala likert terendah yang digunakan dalam penelitian

$$RS = \frac{5-1}{5}$$

$$RS = 0,8$$

Berikut ini akan dijelaskan rentang skala untuk kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Tabel 4.4

Tafsiran Nilai Rata-Rata

No	Interval	Kategori
1	Interval 1 – 1,80	Sangat Rendah
2	Interval 1,81 – 2,60	Rendah
3	Interval 2,61 – 3,40	Sedang
4	Interval 3,41 – 4,20	Tinggi
5	Interval 4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing – masing butir pertanyaan dengan total skor yang diperoleh.

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel} 5%	Sign	Keterangan
<i>E-Budgeting (X₁)</i>	X1.1	0,597	0.2732	0,000	Valid
	X1.2	0,583		0,000	Valid
	X1.3	0,555		0,000	Valid
	X1.4	0,595		0,000	Valid
	X1.5	0,621		0,000	Valid
	X1.6	0,506		0,000	Valid
	X1.7	0,458		0,000	Valid
	X1.8	0,489		0,000	Valid
	X1.9	0,489		0,000	Valid
	X1.10	0,419		0,000	Valid
	X1.11	0,823		0,000	Valid
<i>E-Office (X₂)</i>	X2.1	0,667	0.2732	0,000	Valid
	X2.2	0,668		0,000	Valid
	X2.3	0,702		0,000	Valid
	X2.4	0,606		0,000	Valid

Transparansi dan Akuntabilitas (Y)	Y.1	0,653	0.2732	0,000	Valid
	Y.2	0,714		0,000	Valid
	Y.3	0,480		0,000	Valid
	Y.4	0,550		0,000	Valid
	Y.5	0,458		0,000	Valid
	Y.6	0,520		0,000	Valid
	Y.7	0,513		0,000	Valid
	Y.8	0,731		0,000	Valid
	Y.9	0,596		0,000	Valid
	Y.10	0,591		0,000	Valid
	Y.11	0,450		0,000	Valid
	Y.12	0,472		0,000	Valid
	Y.13	0,493		0,000	Valid
	Y.14	0,424		0,000	Valid
	Y.15	0,581		0,000	Valid
	Y.16	0,537		0,000	Valid
	Y.17	0,521		0,000	Valid
	Y.18	0,606		0,000	Valid
	Y.19	0,585		0,000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2022

Dari hasil uji validitas variabel *E-Budgeting*, *E-Office* dan Transparansi Akuntabilitas dapat dikatakan bahwa keseluruhan pernyataan yang diajukan oleh peneliti terhadap responden valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Angka Standar Reliabel	Kriteria
<i>E-Budgeting</i> (X_1)	0,697	0,60	Reliabel
<i>E-Office</i> (X_2)	0,758	0,60	Reliabel
Transparansi dan Akuntabilitas (Y)	0,649	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2022

Berdasarkan tabel koefisien 4.6 semua variabel tersebut dikatakan reliabel sehingga layak diuji ke tahap selanjutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel, *E-Budgeting*, *E-Office* dan Transparansi Akuntabilitas telah memenuhi persyaratan, artinya bahwa variabel memiliki nilai alpha diatas 0,60 sehingga keseluruhan variabel adalah reliabel.

4.4.3 Analisis Deskriptif

E-Budgeting

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, pertama kali dilakukan terhadap *E-Budgeting* (X_1). Adapun analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel *E-Budgeting* (X_1) disajikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4.7
Deskriptif *E-Budgeting*

	N	Minimum	Maximum	Mean
Ringkasan Dokumen RKPD	100	2	5	3,68
Kebijakan Umum Anggaran	100	3	5	4,26
Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon	100	3	5	4,09
Ringkasan Dokumen RKA – OPD	100	2	5	3,88
Ringkasan Dokumen RKA PPKD	100	2	5	4,08
Ringkasan Dokumen Perda APBD	100	1	5	3,75
Peraturan Daerah tentang APBD	100	2	5	3,77
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	100	1	5	3,45
Ringkasan DPA OPD	100	2	5	3,93
Laporan DPA PPKD	100	3	5	4,50
Perubahan APBD	100	3	5	4,19
E_BUDGETING Total Rata – Rata	100	35	53	4,35
Valid N (listwise)	100			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4,35 yang berarti respon responden tergolong sangat tinggi, atau dapat ditarik kesimpulan *E-Budgeting* baik sangat diperlukan bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah. Dengan nilai rata-rata tertinggi 4,50 diperoleh pada indikator laporan DPA PPKD. Kondisi ini menandakan bahwa bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah laporan DPA PPKD adalah sebagai acuan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-OPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA-OPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian Kepala OPD menyerahkan rancangan DPA-OPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan anggaran keuangan sehingga mampu dilakukan kontroling.

Kemudian indikator terendah ada pada Ringkasan Dokumen RKPD dengan rata-rata sebesar 3,68 yang tergolong masih tinggi hal ini dikarenakan *E-Budgeting* baik sangat diperlukan bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah dengan adanya Ringkasan Dokumen RKPD maka rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas

dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kemudian dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan.

E-Office

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, pertama kali dilakukan terhadap *E-Office* (X_2). Adapun analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel *E-Office* (X_2) disajikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4.8
Deskriptif *E-Office*

	N	Minimum	Maximum	Mean
Dukungan Organisasi Kantor	100	2	5	3,69
Komunikasi antar Lini	100	1	5	3,90
Spesifikasi Dokumen	100	1	5	4,01
Fasilitas Dokumen	100	3	5	3,92
E_OFFICE Total Rata – Rata	100	9	19	4,55
Valid N (listwise)	100			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4,55 yang berarti respon responden tergolong sangat tinggi, atau dapat ditarik kesimpulan *E-Office* baik sangat diperlukan bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah. Dengan nilai rata-rata tertinggi 4,01 diperoleh pada indikator Spesifikasi Dokumen. Kondisi ini menandakan bahwa bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah adanya

spesifikasi dokumen sangat diperlukan dikarenakan memberikan informasi dokumen mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan bahkan dapat memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan pada masa yang akan datang. Analisis dokumen pekerjaan memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan, hubungannya dengan pekerjaan lainnya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan lingkungan kerja dimana pekerjaan tersebut dijalankan.

Kemudian indikator terendah ada pada dukungan organisasi kantor yang memiliki rata – rata sebesar 3,69 yang masih tergolong dalam kategori tinggi, hal ini dikarenakan bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah dukungan organisasi kantor memiliki manfaat sebagai sebuah dukungan untuk Sumber daya manusia ASN yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi instansinya. Adanya Dukungan Organisasi yang memiliki sumber daya manusia (karyawan) akan membentuk minat berprestasi karyawan dalam pekerjaannya dan mampu memberikan kontribusi yang banyak bagi kemajuan organisasi tersebut akan kemudian diikat dan diberdayakan sebaik mungkin oleh organisasi. Karyawan tersebut mampu bertahan pada jangka waktu yang lama untuk bekerja pada organisasi, jika karyawan tersebut memiliki rasa senang nyaman, dan aman dalam bekerja.

Transparansi dan Akuntabilitas

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, pertama kali dilakukan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas (Y). Adapun analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Transparansi dan Akuntabilitas (Y) disajikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 4.9

Deskriptif Transparansi dan Akuntabilitas

	N	Minimum	Maximum	Mean
Ringkasan RKA dan Perubahan APBD	100	3	5	4,49
Rencana Umum Pengadaan	100	3	5	4,61
Perda tentang pejabat Pengelola Keuangan	100	2	5	3,78
Perda tentang kebijakan akutansi	100	2	5	3,84
Laporan Arus Kas	100	2	5	3,93
Laporan Realisasi anggaran seluruh OPD	100	1	5	4,36
Peraturan Laporan Keuangan	100	3	5	4,35
Realisasi Anggaran	100	3	5	4,50
Neraca Keuangan	100	3	5	4,19
Laporan Keuangan	100	2	5	3,69
Laporan akuntabilitas dan kinerja	100	1	5	3,90
Penetapan perda	100	2	5	3,83
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100	2	5	4,13
Opini BPK Republik Indonesia	100	3	5	4,21
Perda tentang kebijakan akutansi	100	3	5	4,43
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	2	5	3,68
Laporan Keuangan	100	2	5	4,11
Perda tentang pejabat pengelola keuangan	100	3	5	4,50
Laporan keuangan secara elektronik	100	3	5	4,18
TRANSPARANSI_AKUNTABILITAS Rata- Rata	100	66	85	4,867
Valid N (listwise)	100			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 4,86 yang berarti respon responden tergolong sangat tinggi, atau dapat ditarik

kesimpulan Transparansi dan Akuntabilitas yang baik sangat diperlukan bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah. Dengan nilai rata-rata tertinggi 4,61 diperoleh pada indikator Rencana Umum Pengadaan . Kondisi ini menandakan bahwa bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah adanya Rencana Umum Pengadaan memiliki fungsi yaitu Rencana Umum Pengadaan dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat perlu di lakukan guna untuk meningkatkan kualitas pengadaan. Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah, Peranannya sangat strategis dan menentukan dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan, Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan.

Kemudian indikator terendah ada pada laporan keuangan yang masih tergolong tinggi yaitu sebesar 3,69. Hal ini dikarenakan bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah sangat memerlukan laporan keuangan yang handal sehingga mampu membentuk Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi beberapa pihak yang membutuhkan informasi mengenai laporan tersebut. Laporan keuangan dapat memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan dan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.

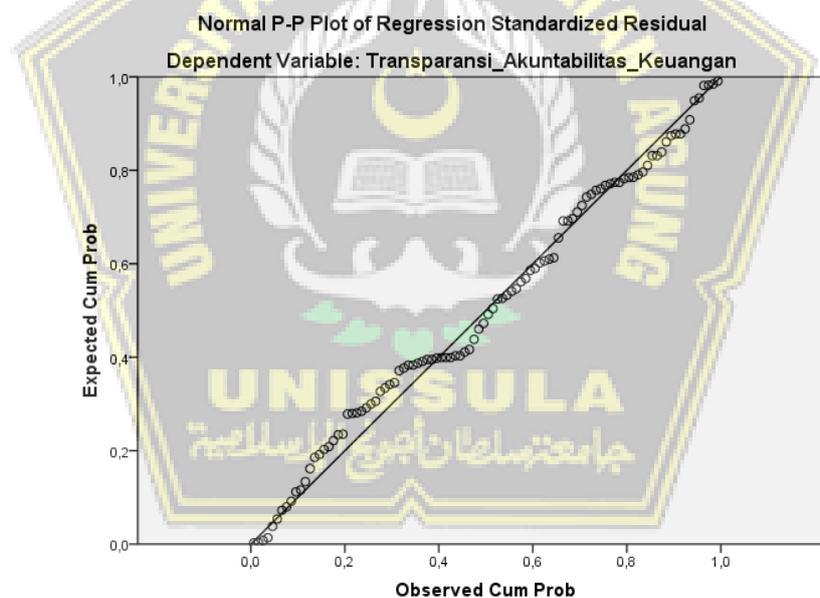
4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan uji normal *probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,2006).

Gambar 4.1

Pengujian Normalitas dengan Grafik Scatterplot



Berdasarkan gambar diatas hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan melalui analisis grafik ini, jika data menyebar di sekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model

regresi memenuhi asumsi normalitas. Sementara dasar pengambilan keputusan Uji Kolmogorov Smirnov yaitu data yang normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05.

Tabel 4.10
Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,01775973
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,054
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,764
Asymp. Sig. (2-tailed)		,604

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel uji Kolmogorov Smirnov Test menunjukkan angka nilai signifikansi 0,630 berarti telah melebihi diatas nilai signifikansi yaitu 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel teikat (*dependen*) yaitu ZPERD dengan residualnya SRESID. Kriteria yang digunakan adalah jika terjadi pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.11

Uji Heterokedastisitas

5. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,304	2,659		3,123	,002
	Elektronik_Budgeting	-,043	,056	-,074	-,763	,448
	Elektronik_Office	-,265	,086	-,299	-3,087	,423

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tabel dapat diketahui bahwa nilai Sig. dari masing-masing variabel adalah sebesar 0,448 untuk variabel Elektronik Budgeting dan 0,423 untuk variabel Elektronik Office. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing variabel tidak signifikan, atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05.

5.1.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel bebas berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah

variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas = 0. Multikoloneritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.12

Uji Multikoloneritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>Electronic Budgeting</i>	0,986	1,014
<i>Electronic Office</i>	0,986	1,014

Sumber : Data Primer yang diolah,2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai.

5.1.2 Regresi Linier Berganda

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer spss for windows versi 16.0. Persamaan regresi berganda digunakan untuk menguji H1 sampai H7 yaitu pengaruh variabel bebas (*E-Budgeting dan E-Office*) terhadap variabel terikat (Transparansi dan Akuntabilitas). Pengolahan data dengan program SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.13
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58,189	4,410		13,195	,000
Elektronik_Budgeting	2,031	,593	,426	5,336	,037
Elektronic_Office	1,231	,142	,661	8,648	,000

a. Dependent Variable: Transparansi_Akuntabilitas_Keuangan

Model persamaan adalah sebagai berikut : $Y = 0,4262X_1 + 0,661X_2 + E$

Dari model tersebut diatas menunjukkan bahwa regresi memiliki arah positif sebagaimana yang diharapkan.

E-Budgeting memiliki arah positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas yang berarti bahwa *E-Budgeting* yang lebih baik akan meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, dan selanjutnya hasil tersebut dapat diinterpretasikan untuk besarnya nilai dari masing masing regresinya.

E-Office memiliki arah positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas yang berarti bahwa *E-Office* yang lebih baik akan meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, dan selanjutnya hasil tersebut dapat diinterpretasikan untuk besarnya nilai dari masing masing regresinya.

5.1.3 Uji Simultan (Uji f)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F <$

0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14

Uji Simultan (Uji f)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	712,529	2	356,265	38,330	,000 ^a
	Residual	901,581	97	9,295		
	Total	1614,110	99			

a. Predictors: (Constant), Elektronik_Office, Elektronik_Budgeting

b. Dependent Variable: Transparansi_Akuntabilitas_Keuangan

Persamaan model diperoleh hasil F Hitung sebesar 38,300 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan nilai F Hitung lebih besar dari F Tabel ($38,330 > 2,65$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Oleh karena itu variabel Elektronik Budgeting dan Electronic Office secara bersamaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan dapat disimpulkan model penelitian layak digunakan dan diteliti lebih lanjut.

5.1.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Maksud dan tujuan koefisien determinasi adalah mengukur besarnya kemampuan model persamaan regresi (*independen variable*) dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 4.15

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,664 ^a	,741	,730	3,049

a. Predictors: (Constant), Elektronik_Office, Elektronik_Budgeting

b. Dependent Variable: Transparansi_Akuntabilitas_Keuangan

Pada tabel 4.13 ditunjukkan nilai R^2 pada model regresi satu sebesar 0,730 yang artinya 73,0% variasi dari Transparansi dan Akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel independen *E-Budgeting* dan *E-Budgeting* sedangkan sisanya 27 % Transparansi dan Akuntabilitas dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

5.2 Pembahasan

Pengaruh *E-Budgeting* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil penelitian ini terbukti bahwa *E-Budgeting* efektif untuk membangun Transparansi dan Akuntabilitas. Artinya semakin tinggi *E-Budgeting* yang dirasakan konsumen, maka tidak semakin tinggi pula Transparansi dan Akuntabilitas konsumen yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penilaian responden tentang salah satu variabel *E-Budgeting* yang tertinggi yaitu indikator laporan DPA PPKD . Kondisi ini menandakan bahwa bagi karyawan yang bekerja

sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah laporan DPA PPKD adalah sebagai acuan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-OPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan.

E-Budgeting yang baik akan sangat diperlukan untuk kar karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah. Dengan keberadaan Ringkasan Dokumen RKPD, maka rancangan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal yang telah ditentukan. Dengan melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program serta kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD untuk menyinergikannya dan mengharmonisasikan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Rancangan DPA-OPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian Kepala OPD menyerahkan rancangan DPA-OPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan anggaran keungan sehingga mampu dilakukan kontroling. Hal ini didukung oleh penelitian mengenai Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan (Nasution, 2019). Implementasi e-budgeting yang efektif pada tiap daerah di Indonesia diharapkan akan memperoleh manfaat dalam kemudahan dalam pengelolaan keuangan daerah, proses transaksi akan lebih cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga E-budgeting merupakan

suatu sistem digital penganggaran yang berbasis aplikasi atau program untuk memfasilitasi proses penganggaran dengan tujuan mempermudah pelaksanaan dari kegiatan penganggaran dan perencanaan.

Pengaruh *E-Office* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil penelitian ini terbukti bahwa *E-Office* efektif untuk membangun Transparansi dan Akuntabilitas. Artinya semakin tinggi *E-Office* yang dirasakan konsumen, maka tidak semakin tinggi pula Transparansi dan Akuntabilitas konsumen yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penilaian responden tentang salah satu variabel *E-Office* yang tertinggi yaitu indikator Spesifikasi Dokumen. Kondisi ini menandakan bahwa bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah adanya spesifikasi dokumen sangat diperlukan dikarenakan memberikan informasi dokumen mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan bahkan dapat memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan pada masa yang akan datang.

Analisis dokumen pekerjaan memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan, hubungannya dengan pekerjaan lainnya, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan lingkungan kerja dimana pekerjaan tersebut dijalankan. dukungan organisasi kantor memiliki manfaat sebagai sebuah dukungan untuk Sumber daya manusia ASN yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi instansinya. Adanya Dukungan Organisasi yang memiliki sumber daya manusia (karyawan) akan membentuk minat berprestasi karyawan dalam pekerjaannya dan mampu

memberikan kontribusi yang banyak bagi kemajuan organisasi tersebut akan kemudian diikat dan diberdayakan sebaik mungkin oleh organisasi. Karyawan tersebut mampu bertahan pada jangka waktu yang lama untuk bekerja pada organisasi, jika karyawan tersebut memiliki rasa senang nyaman, dan aman dalam bekerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Hermana, 2018) yang menjelaskan *E-Office* atau sistem aplikasi dalam administrasi yang digunakan pemerintah dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau *good governance*. *E-Office* diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam proses administrasi atau pendokumenan yang meminimalisir resiko kehilangan, kemudahan dalam pengelolaan dokumen, kemudahan dalam pencarian dokumen atau arsip dokumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Sehingga *E-Office* dalam fungsi transparansi dan akuntabilitasnya akan dapat menciptakan kepercayaan publik. Aplikasi *E-Office* adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi yang secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi, di mana data, informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikas dengan tujuan membangun suatu sistem yang mampu mengakomodasi setiap unsur unsur *good corporate governace*.

Pengaruh *E-Budgeting* dan *E-Office* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas secara Simultan

Persamaan model diperoleh hasil F_{Hitung} sebesar 38,300 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan nilai F_{Hitung} lebih besar dari F_{Tabel} ($38,330 > 2,65$) dan

nilai signifikansi $0,000 < 0,005$. Oleh karena itu variabel *E-Budgeting* dan *E-Office* secara bersamaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Dan dapat disimpulkan model penelitian layak digunakan dan diteliti lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Ramadhan pada 32 pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi e-budgeting berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah (Nasution&Ramadhan, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Vanda yang menunjukkan bahwa implementasi *E-Budgeting* mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya (Vanda, 2020).

Dalam penerapannya ASN Pada Pemprov Jawa Tengah adanya Rencana Umum Pengadaan memiliki fungsi yaitu Rencana Umum Pengadaan dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat perlu dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas pengadaan. Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah, Peranannya sangat strategis dan menentukan dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan, Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan.

Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Atika bahwa tidak ada pengaruh Implementasi *E-Budgeting* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, hal tersebut disebabkan karena penerapan e-budgeting pada Pemerintah Kota Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun sehingga ukuran pengaruhnya belum dapat dinilai secara maksimal dan hal tersebut diperjelas dengan hasil hubungan antara *E-Budgeting* dalam meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi juga bernilai rendah (Nasution&Atika, 2019). Selain sistem penganggaran digital, aplikasi yang berhubungan dengan administrasi yaitu *E-Office*. Sistem aplikasi yang berhubungan dengan administrasi atau dikenal dengan *E-Office* yang menunjukkan bahwa ketercapaian atau implementasi *E-Office* dalam meningkatkan fungsi transparansi dan akuntabilitas sudah tercapai bahkan ada sangat tercapai namun secara hubungan ternyata terdapat tidak pengaruh Implementasi *E-Office* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Nasution&Malikhah, 2020).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

E-Budgeting mempunyai dampak yang signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa *E-Budgeting* yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E-Office mempunyai dampak yang signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa *E-Office* yang tinggi mempunyai pengaruh yang semakin besar terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E-Budgeting dan *E-Office* mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan saling menguatkan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa *E-Budgeting* dan *E-Office* yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Saran

Dengan demikian implikasi hasil penelitian ini bagi menejerial dapat dikembangkan berdasarkan hasil tersebut adalah :

Dilihat dari nilai koefisien beta tertinggi pada penelitian ini ada pada variabel *E-Office* sebesar 0,661 hal ini menandakan dari tiga variabel yang ada variabel *E-*

Office memiliki pengaruh yang paling besar sehingga saran untuk implikasi manajerial adalah diharapkan instansi pemerintah mampu membentuk *E-Office* yang menunjukkan efek berupa *E-Office* bagi sumber daya manusia dalam meningkatkan fungsi transparansi dan akuntabilitas sudah tercapai bahkan ada sangat tercapai. Sehingga Implementasi *E-Office* dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi aplikasi berupa sistem *E-Office* dapat memberikan kemudahan dalam mengelola administrasi perkantoran seperti proses surat menyurat. Sistem aplikasi *E-Budgeting* dan *E-Office* sangat diperlukan di era transformasi digital seperti sekarang untuk mewujudkan *good governance*.

Diharapkan perlu adanya *E-Budgeting* yang sangat diperlukan bagi karyawan yang bekerja sebagai ASN Pada Pemprov Jawa Tengah dengan adanya Ringkasan Dokumen RKPD maka rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Rencana Kerja OPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kemudian dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022, dimana pada tahun ini pandemi covid-19 masih belum mereda juga. Sehingga terdapat kebijakan WFH (*Work From Home*) pada instansi yang merupakan tempat penyebaran kuesioner dan menjadi salah satu keterbatasan utama penulis. Penerapan WFH membuat respon dari para

responden menjadi lebih sulit dikumpulkan.

5.4 Agenda Peneliti Mendatang

Untuk penelitian peneliti mendatang, diharapkan dalam pengumpulan data tidak hanya menggunakan kuesioner saja, namun juga dengan melakukan wawancara atau survei langsung, supaya mengurangi adanya bias data responden dalam menjawab semua pertanyaan kuesioner yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11(2), 611–628.
- Andriyanto, N. 2014. *Good E-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Anwar, Azwar. 2013. Peran Spi terhadap Pencapaian Opini Wtp dan Pencegahan Korupsi melalui Penerapan Gug (Analisis Studi Pustaka). 11(1).
- Asis, D., Gonzales, M. 2015. *Reducing Corruption at the Local Level*. World Bank Institute: Washington.
- Asrida. 2015. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 1, No. 1, 31-35.
- Cui. 2014. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 15(1), 34–47.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Endrayani, K. S., Adiputra, I. M. P., & Darmawan, N. A. S. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja. *EJournal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.
- Fajri, R. N., Djumali, & Hartono, S. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang). *Jurnal Balance*, XVI(1), 64–83.

- Faridah, Suryono, B. 2013. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDES). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4.No. 5.
- Ghozali, I. 2014. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermana, B., Tarigan, A., Medyawati, H., & Silfianti, W. 2018. E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web, 3rd. *International Conference on E-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*, 194–199.
- Huse, Morten. 2007. *Boards, Governance and Value Creation: The Human Side of Corporate*.
- Izzati, Nur N & Marsofiyati. 2018. Penerapan E-Office Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Bisnis Perusahaan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* Vol. 18 No. 2 Hal: 160 – 164.
- Juairiyah, Oktaf & Hendrixon. 2017. Penerapan E-Office Dalam Administrasi Perkantoran (Studi Kasus: Balitbangda Prov Sumsel. *Jurnal Pembangunan Nagari* Volume 2 Nomor 1: 75 – 84.
- Khairudin dan Erlanda, R. 2016. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota se-sumatra). *Jurnal Akuntansi&Keuangan*, Vol. 7, No. 2, 137 – 140.
- Kholmi, M. 2014. Persepsi pengurus partai terhadap akuntabilitas keuangan partai politik. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2088-0685 Vol.3, No. 1, 364-365.
- Klitgard, R. 2015. International cooperation against corruption. *Finance and development*, Vol. 35, No.1, 4-6.

- Lulaj, E., & Haxhi, P. 2019. Transparency And Accountability In The Public Budget, Empirical Study (Data Analysis) In Local Governments-Municipalities. *International Journal of Education and Research*, 7(4), 69–86.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, D. A. D. 2019. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 30-43.
- Permendagri Nomor 13 Tahun.2008.Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramono H, dkk. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puron-Cid, G., & Gil-Garcia, J. R. 2018. Performance and Accountability in E-Budgeting Projects. *International Journal of Electronic Government Research*, 722–734. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-857-4.ch065>.
- Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi.2018. Evaluation of E-Budgeting Implementation in Provincial Government of DKI Jakarta Using CIPP Model Approach. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001110>.
- Ramawati, N. M. I., Pascarani, N. N. D., & Supriyanti, N. W. 2015. Penerapan E-Office Dalam Rangka Mewujudkan E-Government (Studi Kasus: Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

- Riandari, F., Hasugian, S. P., Simangunsong, A., & Simanjorang, M. R. 2018. Penyuluhan Pengimplementasian Aplikasi E-Office Untuk Mendukung Penerapan E-Government di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. EISSN: 2716-1579 Vol 1 No 2, pp. 56-60.
- Rinaldi, R. R. 2016. Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–12.
- Sa'adah, Binti. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E – Government (Studi Tentang Penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bilitar).
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. 2013. Indeks keterbukaan badan publik menyediakan informasi anggaran secara berkala: mengukur keterbukaan informasi anggaran berbasis website. Retrieved from sekretariat@seknasfitra.org website: www.seknasfitra.org.
- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.
- Shopia, A., & Husen, B. 2013. Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada website (studi pada kota/kabupaten seluruh Indonesia). Jurnal Media Indonesia, 12(4).
- Solihin, Dadang. 2007. Pengukuran Good Governance Index. Website: <https://www.slideshare.net/mobile/DadangSolihin/pengukuran-good-governance/index>.
- Sriwijayanti, H. 2018. Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). Jurnal Ekobistek, 7(1), 89–101.
- Sugiyono. 2015. Metode Kualitatif Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV alfabeta.

- Susanto, H. 2015. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan pada PNPM mandiri perdesaan di kabupaten situbondo.
- Vanda Indiharua.2020. Pengaruh Implementasi E-budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Surabaya. STIE Perbanas: Srabaya.
- Woro, S. J., & Supriyanto, S. 2016. Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1865>.
- Yildiz, F., Sagdic, E. N., & Tuncer, G. 2017. Budgetary Transparency, E Government and Corruption: New Evidence From Panel Data Approach. *Ecoforum Journal*, 6(1), 1–14.
- Zucolotto, R., & Teixeira, M. A. C. 2015. Budgetary Transparency and Democracy: The Effectiveness of Control Institutions. *International Business Research*, 7(6), 83–96. <https://doi.org/10.5539/ibr.v7n6p83>.

